

Bahas Alat Penangkapan Ikan, Irjen PSDKP-KKP Rapat Koordinasi Lintas Instansi di Tanjab Barat

Bahas Alat Penangkapan Ikan, Irjen PSDKP-KKP Rapat Koordinasi Lintas Instansi di Tanjab Barat

Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengadakan Rapat Koordinasi Lintas Instansi, untuk membahas aturan tentang larangan alat penangkap ikan (API) berupa pukat hela dan pukat tarik.



Rapat Koordinasi tersebut dibuka oleh Syafrizal, Kepala SubDirektorat Pengawasan Penangkapan Ikan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan SDP, Dirjen PSDKP-KKP di dampingi Kabid pengawasan dan penguatan daya saing produk (PPDSP) Dinas Perikanan Provinsi Jambi dan Dit Polairud Polda Jambi.



Irjen PSDKP-KKP Rapat Koordinasi Lintas Instansi di Tanjab Barat (Tribunjambi/Darwin Sijabat)

Syafrizal menyampaikan hasil dari kegiatan tersebut

bertujuan untuk mensosialisasikan aturan tentang pelarangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela dan pukat tarik.

Serta memberikan edukasi kepada para instansi terkait tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pukat hela dan pukat tarik pada jangka panjang.

"Terkait tentang dilarangnya pukat hela dan pukat tarik kita harus menyegerakan pengganti alat tangkap yang di sediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah," terangnya.

Mengenai dampak yang terjadi oleh pukat hela dan pukat tarik, Syahfrizal mengatakan, berdampak pada ekologi dan sosial, salah satunya berdampak kepada anak cucu di masa depan.

Diharapkan dengan kegiatan seperti ini akan tumbuh kesadaran kepada para nelayan untuk beralih kepada alat tangkap ramah lingkungan.

Karena itu dianjurkan pemerintah keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan akan terus lestari sehingga dapat dinikmati oleh generasi di masa akan datang.

"Ke depan solusi seperti alat tangkap harus di anggarkan di APBD atau APBN," pungkasnya.